

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2018

Alamat Kantor:

Jl. Letkol Pol. Toegino No. Telp./Fax. (0742) 21021 Email:p3ap2kbbkabtanjabbarat@yahoo.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat membuat dan menyampaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Akhir Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rancangan Renja Akhir ini merupakan pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditentukan Tahun 2019. Adapun penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran pagu prakiraan maju Tahun 2020.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Juni 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Dra. Hj. ENHARRYATI

Pembina Utama Madya

NIP. 19600818 198303 2 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
INDIKATOR KINERJA	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	28
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019	29
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan sebagai salah satu pendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pada prinsipnya penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan yaitu: (1) Persiapan penyusunan Renja, (2) Penyusunan Rancangan Renja, (3) Pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menyusun Rancangan Renja akhir ini mengacu pada Renstra Dinas Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Tahun 2019 ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi tanggung jawab Dinas dalam urusan wajib kewenangan pemerintah daerah non pelayanan dasar yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Serta menjadi dasar estimasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang pagu anggaran sesuai dengan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditentukan untuk Tahun 2019.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini disusun secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah dilakukan forum interen dalam lingkup dinas yaitu Kepala Dinas selaku pelaksana kebijakan bersama dengan Sekretaris, para Kabid/Kasubbag/Kasi selaku pelaksana teknis program dan kegiatan, kemudian dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengundang Dinas terkait, karena melalui forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahun 2019 yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan kegiatan serta untuk mendukung program serta sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam rumah tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- x. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- y. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Nomor 52 Tahun 2017 tentang penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Maksud penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1(satu) tahun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat prioritas pembangunan daerah yang direalisasikan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, bidang pengendalian penduduk dan penggerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta penguatan lembaga Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 secara sistematis disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

- BAB I** Berisi uraian latar belakang, landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan rencana kerja Tahun 2019.
- BAB II** Berisi evaluasi pelaksanaan renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, menyampaikan usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.
- BAB IV** Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 telah melaksanakan 8 program yang terdiri dari 5 program pendukung dan 3 program utama/strategis yang sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam dokumen anggaran perencanaan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah untuk pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tahun 2017, ada 12 indikator kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dengan mengacu pada indek pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak, penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas di tingkat nasional sebagaimana arah kebijakan pemerintah.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 yaitu pengukuran terhadap 4 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja utama. Evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja pada indikator kinerja antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2016) menunjukkan realisasi target capaian indikator kinerja ke tahun 2017 ada yang meningkat dan ada yang menurun, secara keseluruhan target dan hasil capaian kinerja Tahun 2017 dan tahun sebelumnya capaiannya mencapai sekitar 50%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dari tiap indikator kinerja dapat dijelaskan antara lain :

a) Indikator kinerja utama : yaitu Indek Pembangunan Gender (IPG) 84,81

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator kinerja utama yaitu Indek Pembangunan Gender (IPG). Tahun 2017 angka IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada angka 84,81 yang merupakan angka penghitungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pada Tahun 2015, karena angka tahun 2016 dan 2017 belum tersedia. Dari angka 84,81 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan /gap kinerja pelayanan sebesar 15,19 dari target 100, keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih lebih rendah dari IPG Provinsi Jambi (88,84) dan Nasional 91,03. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah dengan membandingkan IPM Perempuan dibagi dengan IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100, semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

- b) Indikator kinerja utama : Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dengan target 50% dengan harapan tidak ada kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintahan. Berdasarkan data kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada di Badan Kepegawaian persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan ini mencapai 24,24% dengan target 50%, tidak tercapainya target dimaksud, hal ini karena dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada mengadakan rekrut aparatur pemerintah, sedangkan setiap tahunnya perempuan ada juga yang telah mencapai masa pensiun.

- c) Indikator kinerja utama : Partisipasi angkatan kerja/pencari kerja perempuan;

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini diperoleh data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwasanya partisipasi angkatan kerja ini dapat dilihat dari jumlah pencari kerja perempuan yang mendaftar dalam tahun 2017 mencapai 33,15% jika dibandingkan dengan pencari kerja kaum laki-laki, kaum perempuan jauh lebih rendah. Partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah memberikan ruang partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan serta seberapa besar motivasi perempuan untuk bekerja baik di Desa maupun di Kota.

- d) Indikator Kinerja utama : Persentase kuota perempuan dalam legislatif

Capaian kinerja sebesar 14,28%, jika dibandingkan dengan target 30% maka capaian kinerja adalah 47,60%. Tidak tercapainya target kinerja ini karena partisipasi perempuan di legislatif dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah dan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta kesempatan dalam kegiatan ekonomi masih minim. Selain itu konstruksi budaya patriarki yang mempengaruhi sehingga peran perempuan tidak mampu setara dengan laki-laki karena dianggap subordinat dan stereotipe lemah

serta sifat manja. Data anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan perempuan berjumlah 5 orang dari 35 orang jumlah anggota DPRD, Indikator kinerja : Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan target 100%. Pencapaian perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dilihat dari persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target 100% dan terealisasi 100%. Artinya berapa jumlah kasus yang ada penanganannya dapat dilakukan secara keseluruhan.

- f) Indikator kinerja : Persentase peningkatan pelaksanaan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan hasil capaian kinerja 61,53%. Tidak tercapainya target kinerja ini karena belum semua anak-anak yang mendapat kekerasan baik fisik maupun psikis melaporkan ke P2TP2A serta belum semua fasilitas yang tersedia ramah anak terutama sekolah dan failitas kesehatan serta belum semua Kecamatan mempunyai Forum Anak Daerah.
- g) Indikator kinerja yaitu Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP) dengan target 1,09%, penetapan target ini memperkirakan dari sisi pengendalian penduduk dan pelayanan KB, akan tetapi LPP Kabupaten adalah Angka hasil proyeksi Pusat Statistik(BPS) sebesar 2,29%, angka proyeksi tersebut merupakan angka rata-rata pertumbuhan penduduk yang harus dikendalikan pertumbuhannya sehingga penambahan penduduk tidak semakin meningkat. Karena berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 118.010.431 jiwa dan perempuan 119.630.913 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 berjumlah 304.899 jiwa terdiri dari laki-laki 158.021 jiwa dan perempuan 146.878 jiwa, dan selama kurun waktu 2010-2014 pertumbuhan penduduk telah mencaoai rata-rata per tahun 2.29%. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk.
- h) Indikator kinerja utama Rasio Akseptor KB
Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 12,57%, jika dibandingkan dengan target 14,91% capaian kinerja adalah sebesar 84,31%. Tidak tercapainya target kinerja ini diperkirakan masih tingginya perkawinan usia dini dan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang Keluarga Berencana, koordinasi lintas sector dan lintas program kepada masyarakat belum efektif terhadap program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- i) Indikator kinerja yaitu Cakupan Peserta KB Aktif, Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 86,49%, jika dibandingkan dengan target 73,55% maka capaian

kinerjanya melebihi dari target kinerja sebesar 12,94%. Artinya jumlah peserta KB Aktif meningkat di tahun 2017 dari target yang telah ditetapkan, akan tetapi menurun dari tahun 2016. Berikut perkembangan sektor Keluarga Berencana Tahun 2016 s.d 2017, sebagaimana tabel di bawah ini :

Perkembangan sektor Keluarga Berencana Tahun 2016 s.d 2017

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Pertumbuhan Per Tahun(%)
1.	PUS program KB Metode Kontrasepsi (MKJP)	12.286	10.406	-39,69
2.	PUS program KB Metode Kontrasepsi (Non MKJP)	33.182	34.335	-13,78
3.	Peserta KB Baru	4.153	6.501	30,43
4.	KB Aktif	51.467	44.741	-16,86

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi untuk PUS yang melakukan program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Peserta KB Baru dan KB Aktif Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 39,69% dan Non MKJP sebesar 13,78% dari tahun 2016. Sedangkan peserta KB Baru meningkat sebesar 30,43% dan KB Aktif menurun sebesar 16,86% dari tahun 2016. Dari perkembangan sektor Keluarga Berencana tersebut diatas yang dapat disampaikan gambaran adanya beberapa masalah yang menyebabkan adanya penurunan peserta KB MKJP maupun Non MKJP yaitu :

- Peserta KB Aktif ada yang ingin segera memiliki anak atau ingin hamil
- Peserta KB ada yang tidak cocok dengan salah satu alat/obat kontrasepsi, karena memiliki penyakit hipertensi atau lainnya.
- Adanya penurunan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) yaitu target peserta KB Aktif dari tahun 2016 ke tahun 2017.
- Tahun 2017 Petugas Lapangan KB (PLKB) sangat minim,
- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya tujuan dan manfaat program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur.

j) Indikator kinerja yaitu Penyuluh KB (PLKB/PKB disetiap Desa/Kel.

Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 8,95%, jika dibandingkan dengan target 29,85% sehingga capaian kinerja adalah 29,98%. Tidak tercapainya indikator karena Petugas PLKB Tahun 2017 baru ada 12 orang pada 134 Desa/Kel yang layak untuk satu Desa/Kelurahan ada 2 PLKB.

k) Indikator kinerja yaitu Menurunnya jumlah Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS)

Upaya mewujudkan keluarga sejahtera dimulai sejak awal terbentuknya keluarga, membangun keluarga diperlukan terobosan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga baik fisik maupun non fisik. Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2016 yaitu :

Secara umum Penyebab Keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu :

-Adanya dukungan dana baik APBD maupun DAK

-Adanya komitmen dari Perangkat Daerah

-Adanya partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan bidang Pmberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kendala dan permasalahan tidak tercapainya target kinerja adalah :

-Kurang SDM baik kualitas maupun kuantitas

-Sarana dan prasarana masih kurang memadai

-Masih kurangnya program dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis

-Kurang tenaga teknis dalam pelayanan KDRT maupun Penyuluh Lapangan (PLKB)

-Kurang wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Solusi yang dilaksanakan adalah :

-Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui perekrutan tenaga teknis yang berkompetensi dan pelaksanaan pelatihan SDM

-Perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung program dan kegiatan

-Perlu penambahan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan adanya penambahan anggaran dari tahun yang lalu.

-Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan.

-Melaksanakan pertemuan/rakor dengan petugas lapangan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerjanya

Berikut Tabel T.C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

TABEL I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017

1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100		100	100	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko, Materai surat menyurat	300 Lbr/12 bln	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi , air dan listrik	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran/keuangan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan dan koran bahan bacaan	6 Majalah /Koran	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah rapat makan dan minum	12 kali Rapat	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah/persentase koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Iklan Layanan	Penyediaan iklan layanan	12 bulan	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	- 1 Genset	0	0	0	0	0	0	0
			- 1 TV	0	0	0	0	0	0	0
			- 2 AC	0	0	0	0	0	0	0
			- 5 Lemari	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	- 2 Laptop - 2 Komputer - 3 Printer - 3 UPS		3 komputer 3 printer 1 psg kursi tamu	3 komputer 3 printer 1 psg kursi tamu	100 100 100	- 2 Laptop - 2 Komputer - 3 Printer - 50 Unit Kursi Plastik	- 2 Laptop - 2 Komputer - 3 Printer - 50 Unit Kursi Plastik	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/perbaikan sarana gedung kantor	- 12 bulan - 1 Paket	12	12	12	100	12 bulan	12 bulan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan/ perbaikan kendaraan dinas operasional	18 unit Roda 4 dan Roda 2	15	15	15	100	3 Unit Roda 4 dan 24 Unit Roda 2	3 Unit Roda 4 dan 24 Unit Roda 2	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/ perbaikan peralatan gedung kantor	25 Unit	21	21	21	100	21 Unit	21 Unit	
	Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB(DAK)	Terlaksananya pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB			3 paket	3 paket	100	1 paket(1 unit)	1 paket(1 unit)	
	Pengadaan sarana Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)	Terlaksananya pengadaan sarana Gedung Balai Penyuluhan KB			14 set/10 unit	14 set/10 unit	100	- 1 Unit Kendaraan Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Roda 2 - 1 Set Komputer dan Printer 14 set pakaian	- 1 Unit Kendaraan Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Roda 2 - 1 Set Komputer dan Printer 14 set pakaian	
	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin Aparatur	100		100	100	100	100	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	65 Stel		51	51	100	59 Stel	59 Stel	
	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100		100	100	100	100	100	

1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	12 jenis laporan / 4 x rakor/monev		32	32	100	35 Buku	35 Buku	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja SDM Aparatur Pemerintah	100		100	100	0	100	100	
	Pengembangan SDM	Mengikuti Bimtek	6 orang		1 paket	0	0	1 paket	1 paket	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunkan rasio kekerasan terhadap perempuan								
	Penyusunan Laporan KDRT	Laporan KDRT	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	Jumlah Pendampingan	20 Kasus							
	Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Jumlah Peserta	50 orang	0	0	0	0	30 orang	30 orang	
	Penguatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah unit pelayanan	40 unit	0	0	0	0	0	0	
	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG)			84,81			100	100	
1	Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjab Barat	Meningkatnya kinerja pengurus dan anggota GOW	22 GOW		22 GOW	22 GOW	100	22 GOW	22 GOW	
2	Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya kinerja pengurus dan anggota DWP	31 OPD		35	35	100	31 OPD	31 OPD	
	Sosialisasi dan advokasi Kebijakan PUG dan Bimbingan manajemen usaha ekonomi keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan desa						150 orang, 5 Desa	150 orang, 5 Desa	
3	Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi PPRG dan Buku Data Terpilah	0	0	0	0	0	30 OPD, 40 buku	30 OPD, 40 buku	
4	Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0		40	40	0			
5	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha ekonomi keluarga	Jumlah Desa yang dilakukan bimbingan manajemen usaha bagi kelompok perempuan	8 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa	100	8 Desa	8 Desa	
	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan perempuan	Pengadaan sarana prasarana usaha	20 unit	0	0	0	0	0	0	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan					100			
	Pelatihan Pokja PUG	Jumlah peserta	50 orang	0	0	0	0			
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P2TP2A)	Terlayannya Perempuan dan Anak korban kekerasan			100%	100%		- 30 Orang	- 30 Orang	
	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	31 OPD	0	0	0	0	0	0	
	Pembinaan Forum Anak Daerah dan Peringatan Hari Anak Nasional	Terlaksananya pertemuan Forum Anak Daerah			1 kali di Kab.	1 kali di Kab.	100	1 kali di Kab.	1 kali di Kab.	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi GN-AKSA(Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GN-AKSA			150(dlm 13 Kec.)	150(dlm 13 Kec.)	100	150 Orang	150 Orang	
	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah peserta dari Dinas Instansi terkait dan siswa mengikuti sosialisasi			100 org	100 org	100	30 Orang	30 Orang	
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 400							
	Perumusan Kebijakan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah Perda/Perbup/RAD	1 dokumen Perbup	0	0	0	0	0	0	
	Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	0	0	150 orang	150 orang	
	Pertemuan Forum Anak Daerah	Jumlah Anak Daerah	54 orang					1xkeg,3 org,1 org	1xkeg,3 org,1 org	
	Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	0	0	0	0	30 Orang	30 Orang	
	Pembinaan dan Lomba Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Puskesmas	16 Puskesmas	0	0	0	0	30 org psrta sosialisasi	30 org psrta sosialisasi	
	Pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang anak	Jumlah Kec.yang dilakukan pembinaan dan pemantauan	13 Kec	0	0	0	0			
	Peringatan Hari Anak Nasional(HAN)	Jumlah kegiatan	1 kali keg.	0	0	0				
	Sosialisasi GN-AKSA(Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GN-AKSA	150 Orang				0	150 Orang	150 Orang	
	Worshop SDM untuk perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah peserta workshop	30 orang	0	0	0		30 Orang	30 Orang	
	Sosialisasi advokasi perkawinan usia anak	Jlh peserta sosialisasi advokasi	130 orang	0	0	0	0	0	0	
	TOT perlindungan anak	Jumlah peserta TOT	40 orang	0	0	0	0	0	0	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,29%							
	Peningkatan penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan	134 Desa/Kel	0	0	0	0	0	0	0
	Pembinaan dan temu koordinasi serta evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB/Motivator/Kader KKBPK	Jumlah pembinaan dan Rakor	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan pelayanan dan pembinaan program keluarga berencana	Jumlah peserta KB Aktif dan KB Baru yang dapat pelayanan KB	42.879 Kb aktif, 3.200 KB Baru		1500 KB Baru	1500 KB Baru	100	13 Kecamatan	13 Kecamatan	
	Pertemuan program keluarga berencana dan pelayanan Kb bagi keluarga miskin (Gardu Kencana)	Jumlah peserta yang ikut dalam pertemuan Gardu Kencana			78 Peserta	78 Peserta	100	50 Peserta	50 Peserta	100
	Pembinaan dan pertemuan program keluarga berencana dan pelayanan Kb bagi keluarga miskin	Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi	78 Peserta							
	Pertemuan Kader kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pertemuan/Rakor Kader kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL) dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga	13 kelompok (BKB, BKR, BKL)		13 kelompok (BKB, BKR, BKL)	13 kelompok (BKB, BKR, BKL)	100	13 kelompok (BKB, BKR, BKL)	13 kelompok (BKB, BKR, BKL)	100
	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terbentuknya kelompok Kader peduli KB Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	55 PPKBD / Sub PPKBD		134 PPKBD	134 PPKBD	100	40 Orang,12 bln	40 Orang,12 bln	100
	Pembinaan dan sosialisasi forum peningkatan pelayanan KB MKJP	Jumlah PUS MKJP pelayanan KB	PUS MKJP	0	0	0	0	0	0	
	Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah siaga kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	55 Sekolah	0	0	0	0	13 Kali	13 Kali	100
	Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader/ masyarakat di kampung KB	Terlaksananya orientasi pendidikan kependudukan bagi kader /masyarakat di kampung KB	0	0	1 kali keg.	1 kali keg.	100	55 Orang	55 Orang	100
	Sosialisasi kampung KB di tiap Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi kampung KB	0	0	13 Kec.	13 Kec.	100			
	Sosialisasi, advokasi dan pembinaan Kampung KB	Jumlah Kec./Desa/Kel.	13 Kec / Desa / Kel	0	0	0	0	0	0	
	Peningkatan katehanan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera dan KS I	PUS Pra Sejahtera dan KS I anggota kelompok UPPKS yang mengikuti pelatihan/pembinaan usaha ekonomi produktif	47 kelompok		0	0	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dukunga Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK)							12 Bulan, 3025 Lembar dan 143 Buah	12 Bulan, 3025 Lembar dan 143 Buah	100
	Orientasi Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK)							13 Kecamatan / 13 Desa / Kelurahan	13 Kecamatan / 13 Desa / Kelurahan	100
	Operasional KIE dan PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)							268 PPKBD dan Sub PPKBD	268 PPKBD dan Sub PPKBD	100
	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)							86 Faskes	86 Faskes	100
	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)							5 Balai Penyuluh	5 Balai Penyuluh	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah, dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan dapat diukur dari hasil capaian target sasaran strategis yang dilaksanakan pada setiap indikator kinerja out put kegiatan.

Kinerja pelayanan yang merupakan ukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

a. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dirumuskan dengan membandingkan IPM laki-laki kali 100 dan cara membacanya yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah IDG yaitu indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambil keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kinerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat dari Rasio KDRT, angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah maupun swasta serta penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari Rasio akseptor KB, Rasio Penyuluh KB/Petugas lapangan KB(PKB/PLKB) di setiap Desa/Kelurahan, Cakupan Peserta KB aktif dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.

Capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 tercakup pada **Tabel T.C. 30** berikut .

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017

No.	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis	
				TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020		TA 2017	TA 2018	TA 2019		TA 2020
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak												
1	Penyusunan Laporan KDRT			0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	Jumlah Pendampingan P2TP2A			Jlh kasus yg melapor	Jlh kasus yg melapor	20 Kasus	20 Kasus	Jlh kasus yg melapor	Jlh kasus yg melapor	20 Kasus	20 Kasus		
3	Jumlah Peserta pelatihan sistem pencatatan pelaporan KDRT			0	0	50 org	50 org	0	0	50 org	50 org		
4	Jumlah unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			0	0	40 unit	40 unit	0	0	40 unit	40 unit		
5	Jumlah GOW			22 GOW	22 GOW	22 GOW	22 GOW	22 GOW	22 GOW	22 GOW	22 GOW		
6	Jumlah DWP OPD			35 OPD	35 OPD	31 OPD	31 OPD	35 OPD	35 OPD	31 OPD	31 OPD		
7	Jumlah peserta sosialisasi advokasi kebijakan PLIC			0	0	31 OPD	31 OPD	0	0	31 OPD	31 OPD		
8	Jumlah Desa yang dilakukan bimbingan manajemen usaha bagi kelompok			7 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa		
9	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi PPRG dan Buku			0	30 OPD, 40 Buku	0	0	0	30 OPD, 40 Buku	0	0		
10	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana usaha pemberdayaan perempuan			0	0	20 unit	20 unit	0	0	20 unit	20 unit		
11	Jumlah peserta Pelatihan Pokja PUG			0	0	50 org	50 org	0	0	50 org	50 org		
12	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah			0	0	31 OPD	31 OPD	0	0	31 OPD	31 OPD		
13	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi GN-AKSA			150 org	150 Org	150 org	150 org	150 org	150 Org	150 org	150 org		
14	Jumlah peserta dari Dinas Instansi terkait dan siswa mengikuti sosialisasi Sekolah Ramah Anak			0	30 Org	100 org	100 org	0	30 Org	100 org	100 org		
15	Jumlah Perda/Perbup/RAD dan peserta sosialisasi			0	50 org	1 Dokumen Perbup	1 Dokumen Perbup	0	50 org	1 Dokumen Perbup	1 Dokumen Perbup		

No.	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020		TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	
				6	7	8		10	11	12		13	
16	Jumlah Anak Daerah dalam FAD			1 kali keg.	1 kali keg.	54 org	54 org	1 kali keg.	1 kali keg.	54 org	54 org		
17	Jumlah Puskesmas Ramah anak			0	30 org	16 Puskesmas	16 Puskesmas	0	30 org	16 Puskesmas	16 Puskesmas		
18	Jumlah Kec.yang dilakukan pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang anak			0	0	13 Kec.	13 Kec.	0	0	13 Kec.	13 Kec.		
19	Jumlah kegiatan HAN			0	0	1 kali keg.	1 kali keg.	0	0	1 kali keg.	1 kali keg.		
20	Jumlah peserta workshop SDM berkebutuhan khusus			0	0	30 org	30 org	0	0	30 org	30 org		
21	Jlh peserta sosialisasi advokasi perkawinan usia anak			0	0	130 org	130 org	0	0	130 org	130 org		
22	Jumlah peserta TOT perlindungan anak			0	0	40 org	40 org	0	0	40 org	40 org		
23	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Desa/Kelurahan memiliki informasi data mikro program KKBPK			134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.		
24	Jumlah pembinaan dan Rakor PKB/PLKB/Motivator KB			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln		
25	Jumlah peserta KB Aktif dan KB Baru yang dapat pelayanan KB			1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru	1500 KB Baru		
26	Jumlah peserta yang ikut dalam pertemuan Gardu Kencana			78 org	78 org	78 org	78 org	78 org	78 org	78 org	78 org		
27	Jumlah Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL)			13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk	13 Klmpk		
28	Jumlah Kader peduli KB IMP			134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD	134 PPKBD		
29	Jumlah PUS MKJP pelayanan KB			11.650	11.650	12.500	12.500	11.650	11.650	12.500	12.500		
30	Jumlah peserta yang mengikuti			0	13 kali	55 sekolah	55 sekolah	0	13 kali	55 sekolah	55 sekolah		
31	Jumlah peserta orientasi pendidikan kependudukan bagi kader masyarakat di kampung KB			1 kali keg.	55 org	0	55 org	1 kali keg.	55 org	0	0		
32	Jumlah Kec./Desa/Kel.pembinaan kampung KB			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.		
33	PUS Pra Sejahtera dan KS I anggota kelompok UPPKS yang mengikuti			47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks	47 klmpok uppks		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu penting/strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut

1. Belum memadainya SDM baik aspek kuantitas maupun kualitas
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah belum optimal
4. Masih rendahnya IPG dan IDG
5. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsive gender
6. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
7. Masih kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
8. Keterbatasan anggaran fasilitas pendampingan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan
9. Belum tersedia sistem data terpilah gender dan anak
10. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
11. Belum semua korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan pada P2TP2A
12. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
13. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus dan program PATBM
14. Masih kurangnya peran Forum Anak Daerah sampai tingkat Kecamatan
15. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak dan anak yang tidak memiliki akte kelahiran

16. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
17. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
18. Masih rendahnya rasio akseptor KB, terutama akseptor yang menggunakan MKJP
19. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*)
20. Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
21. Masih kurangnya kualitas dan rasio SDM Tenaga Penyuluh dan Petugas Lapangan KB(PLKB/PLKB) di setiap desa/kelurahan
22. Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro
23. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
24. Belum optimalnya program Genre dan Pusat Informasi dan koseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)
25. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal RKPD yang disusun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pelaksanaannya melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Didalam dokumen rencana kinerja dimuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaian yang merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui koreksi antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Forum Anak Daerah.

2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan urusan wajib pemerintah guna mengimplementasikan 32 hak anak sehingga anak-anak Indonesia khususnya anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dunianya anak-anak, terhindar dan terlindungi dari tindak kekerasan dan eksploitasi serta untuk mewujudkan khususnya Kuala Tungkal sebagai Kota Layak Anak (KLA)

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat/obat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, pembentukan Kampung KB dan Baksos KB.

4. Bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

Pada bidang ini masyarakat mengusulkan pemerintah daerah melakukan program atau kegiatan diantaranya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin akseptor KB, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), melaksanakan pelatihan upaya peningkatan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga. serta program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pembinaan ketahanan keluarga, masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok bina keluarga (BKB, BKR dan BKL).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA INDIKATOR KINERJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017-2021, tentang telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) maka kebijakan nasional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan
 2. Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
 4. Mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak
 5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan mewujudkan Kota Layak Anak.
- b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
 2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
 3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
 5. Menurunnya Angka kelahiran pada usia Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
 6. Menurunnya kahamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Rencana Kerja Tahun 2019 adalah salah implementasi Renstra Tahun 2016-2021 yang telah direvisi dan sesuai dengan pernyataan Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 juga telah direvisi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mendukung pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke 2 dan 4 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus, dan perlindungan terhadap anak
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender

2. Meningkatnya kualitas keluarga dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO)
3. Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
4. Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak dan kualitas perlindungan terhadap anak
5. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang diawali dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan program dan kegiatan Tahun 2019 dengan mengacu pada matrik Renstra yang telah ditetapkan, kemudian masing-masing kepala Bidang dalam lingkup Perangkat Daerah membuat usulan kepada Kepala Perangkat Daerah. Usulan dari setiap bidang kemudian dibahas melalui Forum Perangkat Daerah, dengan melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kabid dan Kasubbag/Kasi. Tidak ada melibatkan masyarakat ataupun Dinas terkait dan lembaga legislative karena pada usulan yang ada dalam e-musrenbang tidak ada program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas P3AP2KB. Maka Renja disusun yaitu dengan memperhatikan beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi seperti masih rendah Indeks Pembangunan Gender (IPG), belum responsif gender dalam penganggaran di perangkat daerah, tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih minimnya SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari tenaga motivator KB di lapangan, belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan lintas sector dalam pelayanan terpadu perempuan dan anak korban

kekerasan dan kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas, pelayanan korban kekerasan serta minimnya anggaran dan fasilitas operasional P2TP2A.

Dalam Rancangan akhir Renja ini program dan kegiatan yang direncanakan Tahun 2019, sesuai dengan urusan kewenangannya yaitu urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari (1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program yang direncanakan berjumlah 4(empat) program dengan 10 kegiatan, (2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana program yang direncanakan 1(satu) program dengan 6 kegiatan. Sedangkan untuk mendukung program urusan wajib tersebut yang merupakan kegiatan rutin kantor direncanakan 5 program dengan 18 kegiatan. Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2019 adalah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis serta dengan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan pagu anggaran sesuai Rencana Kerja Perangkat (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditentukan oleh Tim Anggaran Tahun 2019. Dari seluruh jumlah program dan kegiatan pembangunan bersumber dari APBD Tahun 2019 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pagu sebesar Rp. 2.199.859.386,- (Dua miliar sratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

A.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan anggaran sebesar Rp. 139.904.000,-

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut

- a. Fasilitas Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan (P2TP2A)

2. Program Peningkatan Peran Serta kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 448.179.890-

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- a. Bimbingan manajemen usaha ekonomi perempuan
- b. Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 60.406.00,-

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)

4. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 253.931.000,-

- a. Perumusan Kebijakan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak
- b. Pertemuan Forum Anak Daerah (FAD)
- c. Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak
- d. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)
- e. Sosialisasi perkawinan usia anak.

B.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 576.795.610,- :

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan temu koordinasi serta evaluasi pendaya gunaan PKB/PLKB/Motivator/Kader KKBPK
- b. Peningkatan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pertemuan kader kelompok Bina Keluarga di Kecamatan(BKB, BKR, BKL)
- d. Fasilitasi pembentukan kader kelompok masyarakat peduli K
- e. Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah siaga kependudukan
- f. Pembinaan dan pertemuan program Keluarga Berencana dan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin

Program Pendukung yang ada di Sekretariat Perangkat Daerah terdiri dari :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 391.607.286,-** Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan
 - h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah
 - k. Penyediaan iklan layanan

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 262.604.000,-** Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 19.500.000,-** Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
- 4. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan dengan anggaran sebesar Rp.288.931.600,-**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-**
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Pagu Indikatif Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 adalah sebagaimana **Tabel T.C.33** berikut :

TABEL T.C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	Rencana Tahun 2019			CATATAN PENTING	Rencana Tahun 2020	
				LOKASI	TARGET 2019	PAGU 2019		TARGET 2020	PAGU 2020
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					391.607.286			
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, Materai surat menyurat	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	1.650.000		12 Bulan	1.650.000
01.02		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi , air dan listrik	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	55.200.000	APBD	12 Bulan	55.200.000
01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran/keuangan	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	91.330.000	APBD	12 Bulan	91.630.000
01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	11.112.032	APBD	12 Bulan	16.000.000
01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	40.864.450	APBD	12 Bulan	51.000.000
01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	14.503.230	APBD	12 Bulan	23.500.000
01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	9.243.600	APBD	12 Bulan	12.800.000
10.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan dan koran bahan bacaan	Dinas P3AP2KB	6 majalah/koran	3.600.000	APBD	6 majalah/koran	6.000.000
01.17		Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah rapat makan dan minum	Dinas P3AP2KB	12 kali rapat	4.200.000	APBD	12 kali rapat	4.200.000
01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah/persentase koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	157.953.974	APBD	12 Bulan	175.000.000
01.28		Penyediaan Iklan Layanan	Penyediaan Iklan Layanan	Dinas P3AP2KB	12 Bulan	1.950.000	APBD	12 Bulan	4.000.000

						262.604.000			
02.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Dinas P3AP2KB	14 Unit	55.254.000	APBD	-2 laptop -2 komputer -3 printer -3 UPS	52.544.440
02.20		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/perbaikan sarana gedung kantor	Dinas P3AP2KB	12 Bulan, -1 Paket	35.000.000	APBD	12 Bulan , -1 Paket	80.000.000
02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas operasional	Dinas P3AP2KB	18 unit roda 4 dan roda 2	165.150.000	APBD	18 unit roda 4 dan roda 2	165.000.000
02.26		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/perbaikan peralatan gedung kantor	Dinas P3AP2KB	25 unit	7.200.000	APBD	25 unit	18.000.000
03.02	Program peningkatan disiplin aparatur					19.500.000			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Dinas P3AP2KB	52 stel	19.500.000	APBD	65 Stel	22.050.000
06.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					28.931.600			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	Dinas P3AP2KB	12 jenis laporan/4 x rakor/monev.	28.931.600	APBD	12 jenis laporan/4 x rakor/monev.	50.000.000
05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					18.000.000			
		Pengembangan SDM	Mengikuti Bimtek	Dinas P3AP2KB	1 Paket	18.000.000	APBD	6 orang	36.000.000
15.06	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan					139.904.000			
		Fasilitasi pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	Jumlah Pendampingan	Kab. Tanjab Barat	20 Kasus	139.904.000	APBD	20 kasus	150.000.000

18.04	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					448.179.890	APBD	8 Desa	400.460.000
15.18		Bimbingan Manajemen usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha ekonomi	Jumlah Desa yang dilakukan bimbingan menejemen usaha bagi kelompok perempuan	1.Desata Taman Raja Kec.Tungkal Ulu, 2.Desata tanjung beranak kec.merlung, 3.desa lubuk lawas kec.Batang asam, 4.desa suak samin kec.pengabuan, 5.desa teluk ketapang kec.senyenang, 6. desa mekar tanjung kec.bram itam, 7.desa sungai terap kec.betara, 8.desa sungai gebar kec.kuala betara	8 Desa	46.479.890	APBD	31 DPW OPD	70.000.000
18.09		Peningkatan kapasitas DWP Kab. Tanjab Barat	Jumlah DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	Kuala Tungkal Kec.Tungkal Ilir	31 DPW OPD	201.500.000	APBD	22 GOW	220.000.000
		Peningkatan kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat	Jumlah organisasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Kuala Tungkal Kec. Tungkal ilir	22 GOW	200.200.000			
18.10	Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak	Pelatihan Pokja PUG	Jumlah Peserta	Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir	50 orang	60.406.000	APBD	50 orang	277.900.000
16.10	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak					253.931.000			
		Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidu anak	Jumlah Perda/Perbup/RAD	kec.bram itam, kec.Tebing tinggi, kec.batang asam, kec.batang asam, kec. muara papalik, dan kec. seberang kota.	1 Buah Perbup	44.901.000	APBD	1 buah Perbup	100.000.000
1		Pertemuan Forum Anak Daerah(FAD)	Jumlah Anak Daerah	Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir	54 orang	46.270.000	APBD	54 orang	275.000.000
19.04		Pembinaan dan pemantauan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	66.075.000	APBD	13 Kecamatan	170.480.000
19.06		Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA)	Jumlah peserta sosialisasi GN-AKSA	kec. renah mendaluh, kec. seberang kota, dan kec.betara	150 Orang	50.415.000	APBD	150 Orang	150.000.000
19.09		Sosialisasi perkawinan usia anak	Jumlah peserta sosialisasi advokasi	Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir	150 Orang	46.270.000	APBD	150 Orang	311.000.000

19.10	Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga					576.795.610			
19.11		Pembinaan dan temu koordinasi serta evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB/Motivator/ Kader KKBPk	Jumlah pembinaan dan Rakor	Dinas P3AP2KB	12 bulan	82.792.000	APBD	12 bulan	22.700.000
19.12		Peningkatan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif dan KB Baru	134 Desa / Kelurahan	42.879 KB aktif, 3.200 KB Baru	56.420.000	APBD	42.879 KB aktif, 3.200 KB Baru	146.410.000
		Pembinaan dan Pertemuan Kader Kelompok Bina keluarga di kecamatan(BKB, BKR,BKL).	Jumlah kelompok Bina Keluarga	5 kecamatan	13 Kelompok (BKB,BKR,BKL)	103.876.000	APBD	13 Kelompok (BKB,BKR,BKL)	200.000.000
15.07		Fasilitas pembentukan kader kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Kader kelompok masyarakat	13 kecamatan	55 PPKBD	207.115.538	APBD	55 PPKBD	110.000.000
15.09		Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui Jalur Formal sekolah siaga kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	13 Kecamatan	55 Sekolah	63.599.572	APBD	55 Sekolah	159.283.000
15.12		Pembinaan dan Pertemuan program keluarga berencana dan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi	Kab. Tanjab Barat	78 Peserta	62.992.500	APBD	78 peserta	272.000.000
JUMLAH						2.199.859.386			3.899.807.440

BAB IV

PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditentukan Tahun 2019 oleh Tim Anggaran berdasarkan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal.

Demikian Rancangan akhir Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, Juni 2018.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Dra. Hj. ENI HARRYATI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600818 198303 2 009